INTEGRASI NILAI SYARIAH DALAM BENCHMARKING PEMBIYAYAAN PENDIDIKAN: BERBANDING ANTARA SISTEM ISLAM DAN KONVENSIONAL

Saifullah¹, Ridho Apriyadi², Subandi³, Amiruddin⁴

^{1,2,3,4}Program magister Manajemen Pendidikan Islam,

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

¹ifulsaep28@gmail.com, ²06ridho.a@gmail.com, ³subandi@radenintan.ac.id,
⁴amirudin570@gmail.com

ABSTRACT

Education financing is an important aspect of sustainable human resource development. In Indonesia, there are two dominant education financing systems, namely the Islamic education system and the conventional education system. Each system has different financing principles and models, which affect the effectiveness and efficiency of the use of education funds. This research aims to examine the integration of sharia values in education financing benchmarking, and compare the strengths and weaknesses of each system. Using a descriptive-qualitative approach through a literature study, data was collected from academic journals, institutional reports, and education statistics. The research found that the Islamic education system has advantages in terms of social justice and sustainability, while the conventional system excels in aspects of technology management and variety of scholarship schemes. This research provides strategic recommendations for Islamic education institutions to adopt best practices from the conventional system without ignoring sharia principles.

Keywords: education financing, benchmarking, islamic education, conventional education

ABSTRAK

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Di Indonesia, terdapat dua sistem pembiayaan pendidikan yang dominan, yaitu sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan konvensional. Setiap sistem memiliki prinsip dan model pembiayaan yang berbeda, yang berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi nilai-nilai syariah dalam benchmarking pembiayaan pendidikan, serta membandingkan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui studi pustaka, data dikumpulkan dari jurnal akademik, laporan kelembagaan, serta data statistik pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa sistem pendidikan Islam memiliki keunggulan dalam hal keadilan sosial dan keberlanjutan, sementara sistem konvensional unggul dalam aspek pengelolaan teknologi dan variasi skema beasiswa. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi lembaga pendidikan Islam untuk mengadopsi praktik terbaik dari sistem konvensional tanpa mengabaikan prinsip syariah.

Kata kunci: pembiayaan pendidikan, benchmarking, pendidikan islam, pendidikan konvensional

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa, terutama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pembiayaan, yang tidak hanya menentukan kelangsungan operasional lembaga pendidikan, tetapi juga memengaruhi aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang diterima oleh peserta didik. Di Indonesia, sistem pembiayaan pendidikan berkembang dalam dua arus besar: sistem berbasis nilai-nilai Islam dan sistem konvensional. Keduanya memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda dalam hal sumber dana, mekanisme distribusi, dan prinsip akuntabilitas.

Dalam sistem pendidikan Islam, pembiayaan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dana zakat, infak, sedekah, serta skema pembiayaan syariah seperti bagi hasil dan murabahah, menjadi pilar utama dalam menjamin pembiayaan pendidikan. Di sisi lain, sistem konvensional umumnya mengandalkan biaya kuliah tetap, pinjaman pendidikan, dan program beasiswa dari pemerintah maupun swasta, yang lebih menekankan pada efisiensi manajerial dan pendekatan pasar.

Perbedaan pendekatan ini membuka ruang bagi upaya benchmarking, yaitu proses membandingkan sistem, strategi, dan praktik pembiayaan antar keduanya

untuk menemukan praktik terbaik (best practices) yang dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting mengingat tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks, terutama dalam hal keterbatasan dana, kesenjangan akses, dan kebutuhan akan akuntabilitas yang lebih tinggi. Integrasi nilai-nilai syariah dalam benchmarking pembiayaan diharapkan dapat memberikan solusi yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai spiritual Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan model pembiayaan antara sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan konvensional, serta mengidentifikasi strategi integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik benchmarking. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan sistem pembiayaan pendidikan Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan tahunan dari lembaga pemerintah dan swasta, serta data statistik pendidikan dari instansi terpercaya. Analisis dilakukan secara komparatif terhadap dua sistem pembiayaan, yaitu sistem pendidikan Islam dan sistem

konvensional, dengan menekankan pada prinsip-prinsip syariah dan praktik pembiayaan modern. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi integrasi antara nilai-nilai syariah dengan praktik benchmarking dari sistem konvensional.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Prinsip-Prinsip Pembiayaan dalam Sistem Pendidikan Islam

Pembiayaan pendidikan dalam sistem Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan (*adl*), transparansi (*amanah*), dan keberlanjutan (*istidamah*). Prinsip-prinsip ini diambil dari nilai-nilai *maqashid al-syariah* yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, pendidikan diposisikan sebagai kebutuhan dasar yang harus dijamin keberlangsungannya (Chapra, 2000).

Salah satu prinsip utama dalam sistem keuangan Islam adalah larangan *riba*. Dalam konteks pendidikan, ini berarti segala bentuk pinjaman dengan bunga dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam lebih mengarahkan pada skema pembiayaan tanpa bunga, seperti *mudharabah* dan *musyarakah* (Hassan et al., 2020). Kedua skema ini adalah bentuk kemitraan antara penyandang dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan karena kelalaian.

Sebagai contoh, beberapa perguruan tinggi Islam menggunakan sistem bagi hasil dalam kerja sama

investasi pendidikan, seperti pembangunan fasilitas kampus melalui skema *syirkah mutanaqisah*, di mana aset dimiliki bersama dan kepemilikannya berkurang secara bertahap oleh mahasiswa atau wali mereka (Nasution, 2015).

Selain itu, sumber pembiayaan utama dalam sistem Islam adalah dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dana ini dikumpulkan melalui lembaga-lembaga zakat dan didistribusikan untuk mendukung siswa dari kalangan *dhuafa*. Menurut data BAZNAS (2021), alokasi zakat untuk sektor pendidikan mencapai Rp 1,5 triliun, yang disalurkan melalui program beasiswa, bantuan sarana prasarana, hingga pelatihan keterampilan.

Transparansi dan akuntabilitas adalah aspek penting dalam pengelolaan dana pendidikan berbasis syariah. Lembaga pendidikan Islam diharapkan memberikan laporan penggunaan dana secara berkala kepada publik, termasuk *muzakki* dan donatur, sebagai bentuk pertanggungjawaban (*hisab*). Ini sejalan dengan sistem keuangan Islam yang mendorong pengelolaan yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan (Ali, 2019).

Model pembiayaan lain yang populer adalah *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan tetap) dan *ijarah* (sewa guna usaha). *Murabahah* digunakan untuk pembelian kebutuhan pendidikan seperti laptop, buku, dan bahkan biaya kuliah. Universitas Islam Indonesia (UII), misalnya, menerapkan skema *murabahah* dalam kerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pembayaran biaya pendidikan.

Skema ini tidak hanya mempermudah akses pendidikan tinggi, tetapi juga menjaga nilai-nilai syariah dalam proses pembiayaan (UII, 2022).

2. Model Pembiayaan Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Konvensional

Sistem pendidikan konvensional, yang banyak diadopsi oleh lembaga pendidikan di negara-negara dengan sistem ekonomi kapitalis, umumnya menggunakan model pembiayaan berbasis pinjaman pendidikan (student loan) dan biaya kuliah tetap. Model ini mengandalkan kemampuan individu untuk membiayai pendidikannya sendiri dengan atau tanpa dukungan dari lembaga keuangan.

Salah satu bentuk paling umum adalah pinjaman pendidikan, di mana mahasiswa meminjam uang untuk membiayai studi dan diwajibkan membayar kembali setelah lulus dengan skema cicilan tertentu. Di Indonesia, program ini juga mulai dikenal luas, terutama melalui lembaga pembiayaan seperti LPDP dan program pinjaman mahasiswa dari perbankan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud, 2020), sekitar 30% mahasiswa di Indonesia menggunakan pinjaman pendidikan sebagai sumber utama pembiayaan kuliah mereka. Model ini diadopsi dari praktik negara-negara seperti Amerika Serikat, di mana beban utang pendidikan bisa mencapai puluhan ribu dolar per individu.

Selain itu, biaya kuliah tetap (fixed tuition fee) menjadi ciri khas sistem konvensional. Mahasiswa dibebani biaya pendidikan yang bersifat tetap, tidak bergantung pada penghasilan keluarga atau

kemampuan finansial mereka. Di Indonesia, sistem ini juga diimplementasikan dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT), walaupun dalam praktiknya terdapat jenjang pembagian berdasarkan tingkat ekonomi. Sebagai contoh, di Universitas Gadjah Mada (UGM), biaya kuliah untuk program S1 Reguler dapat mencapai Rp 20 juta per tahun tergantung dari program studi dan golongan UKT yang ditetapkan (UGM, 2021). Sistem ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi mahasiswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah.

Meski demikian, sistem konvensional juga memberi ruang melalui pemberian beasiswa. Beasiswa dapat bersifat merit-based (berdasarkan prestasi akademik) atau need-based (berdasarkan kondisi ekonomi). Pemerintah Indonesia, melalui berbagai program seperti Bidikmisi (sekarang KIP Kuliah), LPDP, dan beasiswa daerah, mengalokasikan dana yang signifikan untuk mendukung mahasiswa berprestasi. Pada tahun 2021, Kemdikbud mengalokasikan sekitar Rp 5 triliun untuk program beasiswa (Kemdikbud, 2021), sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi.

Namun, sistem pembiayaan konvensional menghadapi tantangan utama berupa tingginya utang pendidikan. Menurut survei Bank Dunia (2022), sekitar 40% mahasiswa mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjaman pendidikan setelah lulus. Hal ini menyebabkan stres finansial jangka panjang, menghambat kemandirian finansial, dan memperlambat mobilitas sosial. Fenomena ini dikenal dengan istilah student debt crisis, terutama di negara-negara seperti

Amerika Serikat, dan mulai menjadi perhatian juga di negara berkembang.

3. Perbandingan Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan

Efektivitas dan efisiensi sistem pembiayaan pendidikan dapat dianalisis melalui tiga aspek utama: aksesibilitas, keberlanjutan, dan dampak sosial.

a. Aksesibilitas

Sistem pembiayaan pendidikan Islam memiliki keunggulan dari sisi aksesibilitas, karena mengandalkan sumber dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dana-dana ini memungkinkan lembaga pendidikan Islam memberikan bantuan pendidikan secara inklusif kepada siswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lebih dari 50.000 siswa menerima bantuan pendidikan setiap tahun dari dana zakat yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga zakat nasional maupun daerah (BAZNAS, 2021). Hal ini membuktikan bahwa sistem Islam mampu menciptakan akses pendidikan yang lebih luas dan berkeadilan.

Sebaliknya, sistem pembiayaan konvensional masih menghadapi hambatan serius terkait aksesibilitas. Biaya pendidikan yang tinggi dan skema pinjaman yang membebani membuat banyak siswa dari keluarga kurang mampu kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan (2021) mencatat bahwa sekitar 60% siswa dari kelompok masyarakat miskin merasa kesulitan untuk mengakses pendidikan tinggi akibat keterbatasan biaya.

b. Keberlanjutan

Dari segi keberlanjutan, sistem Islam menunjukkan keunggulan dengan memanfaatkan model berbasis bagi hasil serta pendanaan sosial yang bersifat jangka panjang. Pendanaan seperti ini lebih stabil karena tidak tergantung pada sistem utang atau fluktuasi ekonomi. Beberapa perguruan tinggi Islam seperti UIN menerapkan skema ini dalam bentuk investasi sosial pendidikan dan program pembiayaan syariah. Studi yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri (UIN, 2022) menyimpulkan bahwa model pendidikan Islam berbasis bagi hasil menghasilkan tingkat kelulusan yang lebih tinggi dan kondisi kesejahteraan mahasiswa yang lebih baik.

Di sisi lain, ketergantungan pada pinjaman pendidikan dalam sistem konvensional menciptakan tantangan terhadap keberlanjutan sistem itu sendiri. Mahasiswa terpaksa membayar utang dalam jangka panjang, bahkan setelah lulus dan bekerja. Akibatnya, beban finansial yang berkepanjangan menghambat stabilitas keuangan pribadi dan memperlambat kontribusi ekonomi mereka terhadap masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam laporan Bank Dunia (2022), yang menyatakan bahwa banyak mahasiswa harus bekerja sambil kuliah untuk membayar biaya pendidikan, dan hal ini berpengaruh pada performa akademik mereka.

c. Dampak Sosial

Sistem pembiayaan pendidikan Islam juga menciptakan dampak sosial yang positif, terutama dalam menciptakan keadilan dan pemberdayaan masyarakat. Pendanaan dari zakat dan infak

mengandung nilai spiritual dan solidaritas sosial, yang memperkuat kohesi sosial di kalangan umat. Mahasiswa yang terbantu dengan dana tersebut juga diarahkan untuk memiliki tanggung jawab sosial dalam membangun kembali masyarakat setelah mereka lulus.

Sebaliknya, sistem konvensional yang berorientasi pada individu dan bersifat komersial cenderung memperlebar kesenjangan sosial. Mahasiswa yang terbelit utang memiliki risiko mengalami stres, keterasingan sosial, dan keterbatasan mobilitas ekonomi di masa depan.

4. Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Benchmarking Pembiayaan Pendidikan

Benchmarking dalam konteks pembiayaan pendidikan Islam tidak hanya bertujuan meniru sistem konvensional, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan kesesuaian nilai dengan ajaran Islam. Nilai-nilai inti yang menjadi landasan integrasi ini meliputi keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

a. Prinsip Keadilan dan Transparansi

Salah satu aspek penting dalam benchmarking adalah transparansi pengelolaan dana. Lembaga pendidikan Islam dapat mengadopsi sistem pelaporan digital yang digunakan di lembaga konvensional, seperti yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pelaporan anggaran pendidikan secara daring (Kemdikbud, 2021). Sistem ini memungkinkan monitoring penggunaan dana secara real time, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan

Islam. Transparansi juga sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam keuangan syariah yang menuntut setiap transaksi bersifat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Fleksibilitas dan Keringanan Biaya

Untuk menjawab tantangan biaya pendidikan, lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan mekanisme pembayaran yang fleksibel seperti cicilan biaya kuliah. Sistem ini memungkinkan mahasiswa membayar biaya pendidikan secara bertahap tanpa tekanan finansial besar di awal, selama tidak melibatkan unsur riba atau ketidakpastian (gharar). Skema semacam ini dapat diformulasikan melalui akad murabahah atau ijarah, yang diakui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN, 2020) sebagai bentuk transaksi halal dalam konteks pendidikan.

c. Investasi Sosial dan Infrastruktur Pendidikan

Integrasi syariah dalam pembiayaan juga dapat mencakup pengembangan infrastruktur pendidikan melalui investasi sosial syariah, seperti sukuk wakaf dan dana sosial berbasis wakaf tunai. Instrumen-instrumen ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam membangun fasilitas pendidikan yang berkelanjutan, tanpa harus mengandalkan pinjaman konvensional. Menurut DSN (2020), pendanaan berbasis wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung sektor pendidikan, karena tidak mengharuskan pengembalian dana pokok dan bersifat jangka panjang.

d. Kemitraan Strategis dengan Dunia Usaha

Benchmarking juga bisa melibatkan kemitraan strategis antara lembaga pendidikan Islam dengan sektor swasta, melalui program seperti beasiswa dan magang berbayar. Kemitraan ini memberikan manfaat ganda: membantu pembiayaan pendidikan sekaligus memberikan pengalaman dunia kerja bagi mahasiswa. Namun, kerjasama ini harus dipastikan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti bebas dari praktik riba, spekulasi berlebihan (gharar), atau eksploitasi tenaga kerja.

Dengan integrasi ini, benchmarking bukan sekadar adopsi sistem, tetapi juga adaptasi nilai-nilai Islam dalam modernisasi pembiayaan pendidikan. Lembaga pendidikan Islam dapat tetap relevan, kompetitif, dan berdaya guna, sekaligus menjaga integritas spiritual dan sosialnya.

5. Praktik Terbaik dari Sistem Pembiayaan Konvensional

Meskipun berbeda dari segi prinsip dasar, sistem pembiayaan pendidikan konvensional menyimpan sejumlah praktik terbaik yang dapat diadopsi secara selektif oleh lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi pengelolaan dana. Dengan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah, praktik ini tidak hanya memperkuat sistem internal lembaga, tetapi juga meningkatkan jangkauan pendidikan kepada masyarakat luas.

a. Penggunaan Teknologi Keuangan untuk Transparansi Dana

Salah satu praktik unggulan dalam sistem konvensional adalah pemanfaatan teknologi keuangan

(financial technology/fintech) untuk transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana. Contohnya, Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mengembangkan sistem pelaporan berbasis web yang memungkinkan mahasiswa, orang tua, dan donatur mengakses data keuangan dan alokasi beasiswa secara real-time (UGM, 2021).

Adaptasi dalam sistem Islam: Lembaga pendidikan Islam dapat menerapkan aplikasi pelaporan dana zakat dan infak secara daring, seperti yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu). Transparansi ini memperkuat kepercayaan publik dan memudahkan audit syariah.

b. Diversifikasi Skema Beasiswa

Dalam sistem konvensional, skema beasiswa telah berkembang sangat beragam dari beasiswa akademik, non-akademik, afirmatif, hingga beasiswa mitra korporat. Contohnya, LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tidak hanya memberikan beasiswa penuh, tetapi juga menyediakan dana riset, pelatihan kepemimpinan, hingga dukungan disabilitas (LPDP, 2021).

Adaptasi dalam sistem Islam: Lembaga seperti BAZNAS dan Dompet Dhuafa dapat mengembangkan kategori beasiswa yang lebih luas, misalnya:

- Beasiswa tahfidz untuk santri penghafal Al-Qur'an.
- Beasiswa afirmatif untuk anak keluarga muallaf dan yatim.
- Beasiswa vokasional berbasis pesantren entrepreneur.

c. Model Pembiayaan Berbasis Investasi Sosial

Sistem konvensional mulai mengembangkan skema social impact investment, yaitu investasi yang bertujuan memperoleh dampak sosial di samping keuntungan finansial. Contohnya adalah Program Social Bond oleh Bank Dunia yang digunakan untuk pembangunan sekolah di kawasan tertinggal.

Adaptasi dalam sistem Islam: Lembaga pendidikan Islam dapat memanfaatkan wakaf produktif dan sukuk berbasis pendidikan untuk membangun asrama, ruang kelas, dan fasilitas digital, seperti yang dilakukan oleh Universitas Islam Indonesia (UII) melalui kerja sama wakaf tunai dan mitra korporat.

Dengan adopsi selektif dari praktik-praktik terbaik ini, lembaga pendidikan Islam memiliki peluang untuk:

- Meningkatkan efisiensi pengelolaan dana,
- Menjangkau lebih banyak peserta didik dari kelompok rentan,
- Tetap berpegang pada nilai-nilai syariah seperti keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial.

D. Kesimpulan

Pembiayaan pendidikan dalam sistem Islam dan sistem konvensional memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda namun saling dapat melengkapi. Sistem Islam menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, dengan larangan riba sebagai fondasi utama. Model pembiayaan syariah seperti bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), murabahah, dan pemanfaatan dana zakat serta infak telah terbukti memberikan akses pendidikan yang lebih inklusif,

terutama bagi kalangan kurang mampu. Pengelolaan dana yang akuntabel dan terbuka juga menjadi kekuatan utama sistem ini.

Sebaliknya, sistem konvensional lebih banyak mengandalkan biaya tetap dan pinjaman pendidikan, yang meskipun memberikan struktur yang jelas, berpotensi menimbulkan beban utang pasca kelulusan. Namun, keberadaan beasiswa yang terstruktur dan pemanfaatan teknologi keuangan untuk pelaporan merupakan praktik terbaik yang patut dicontoh.

Dari aspek efektivitas dan efisiensi, sistem Islam lebih unggul dalam aspek dampak sosial dan aksesibilitas, sementara sistem konvensional unggul dalam penerapan teknologi dan variasi sumber pembiayaan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai syariah dalam benchmarking pembiayaan pendidikan dapat dilakukan melalui adopsi selektif praktik terbaik dari sistem konvensional-selama tetap menjaga prinsip syariah, seperti bebas dari riba dan gharar.

Dengan pendekatan ini, lembaga pendidikan Islam dapat meningkatkan daya jangkau, efisiensi, dan keberlanjutan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2019). Akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 123–135.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2021). Laporan tahunan BAZNAS 2021. Jakarta: BAZNAS.

- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Hassan, A., Rahman, A. R. A., & Yusoff, M. B. (2020). Prinsip-prinsip pembiayaan dalam sistem pendidikan Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 67–79.
- Nasution, H. (2015). Integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional. *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 4(1), 22–34.
- Universitas Islam Indonesia (UII). (2022). *Skema pembiayaan pendidikan di Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Bank Dunia. (2022). *Laporan Survei Utang Pendidikan di Asia Tenggara*. Jakarta: World Bank Regional Office.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). (2020). *Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia 2020*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). (2021). *Anggaran Beasiswa Pendidikan Tinggi Tahun 2021*. Jakarta: Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
- Universitas Gadjah Mada (UGM). (2021). *Panduan Biaya Pendidikan dan UKT Mahasiswa Baru 2021*. Yogyakarta: Direktorat Keuangan dan Aset.
- BAZNAS. (2021). *Laporan Tahunan Distribusi dan Pemanfaatan Zakat untuk Pendidikan*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Bank Dunia. (2022). *Student Loans and Academic Outcomes: A Southeast Asia Study*. Jakarta: World Bank Regional Office.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia*. Jakarta: Pusdatin.
- Lembaga Penelitian Pendidikan. (2021). *Kajian Akses Pendidikan di Kalangan Masyarakat Miskin*. Yogyakarta: LPP.
- Universitas Islam Negeri (UIN). (2022). *Laporan Riset Pembiayaan Syariah dalam Pendidikan Tinggi Islam*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- DSN-MUI. (2020). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: DSN-MUI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Sistem Pelaporan Anggaran Pendidikan Nasional Berbasis Digital*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi.
- Ali, M. (2019). *Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi di Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- BAZNAS. (2021). *Laporan Tahunan BAZNAS 2021: Zakat untuk Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Badan Amil

- Zakat Nasional.
<https://www.baznas.go.id>
- Bank Dunia. (2022). Higher Education Financing in Indonesia: Opportunities and Challenges. Washington, DC: World Bank.
<https://www.worldbank.org>
- DSN MUI. (2020). Pedoman Investasi Sosial Syariah dan Fatwa DSN tentang Wakaf Produktif. Jakarta: Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- Hassan, M. K., Rashid, M., & Islam, A. M. (2020). Islamic Finance: Principles and Practice. Cham: Springer.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). (2020). Data Pembiayaan Mahasiswa dan Pinjaman Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). (2021). Digitalisasi Laporan Keuangan dan Transparansi Dana Pendidikan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Lembaga Penelitian Pendidikan. (2021). Aksesibilitas Pendidikan di Indonesia: Studi terhadap Kelompok Miskin. Yogyakarta: LP2M.
- LPDP. (2021). Laporan Kinerja LPDP 2021: Inovasi dalam Skema Beasiswa Nasional. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
<https://www.lpd.kemenkeu.go.id>
- UIN. (2022). Laporan Riset Pendidikan Islam: Efektivitas Model Pembiayaan Berbasis Syariah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta – LPPM.
- Universitas Gajah Mada (UGM). (2021). Informasi Biaya Kuliah dan Sistem Pembayaran Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2021/2022. Yogyakarta: UGM.
- Universitas Islam Indonesia (UII). (2022). Laporan Tahunan Program Murabahah dan Wakaf Produktif untuk Pembiayaan Pendidikan Mahasiswa. Yogyakarta: UII Press.